

RINGKASAN

**LOLITA
PRASETYANI
NIM 210510135**

**PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM
MENGAWASI TINDAK PIDANA *IKHTILATH*
OLEH WISATAWAN ASING (Johari, S.H.,M.H.
dan Fitri Maghfirah, S.H.,M.H.)**

Pemerintahan Aceh telah mengeluarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, Pada Pasal 5 butir (c) tentang larangan melakukan tindak pidana *ikhtilath* yang berlaku bagi semua orang yang berada di Aceh, namun terjadi perbuatan *ikhtilath* yang dilakukan oleh wisatawan asing saat berada di Kota Sabang dan tidak mendapatkan perhatian serius dari aparat yang berwenang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya wilayatul hisbah dalam menindak *jarimah ikhtilath* di kota sabang, mengidentifikasi hambatan dalam penegakan Qanun, serta memberikan solusi yang tepat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Data diperoleh dengan beberapa teknik, yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan petugas wilayatul hisbah, geuchik, tokoh agama, masyarakat, dan wisatawan asing, lalu dianalisis secara kualitatif

Hasil penelitian ini menunjukkan wilayatul hisbah tidak memiliki SOP khusus, keterbatasan personel, kurang terlatih bahasa asing, dan pasif menanggapi pelanggaran *ikhtilath* oleh wisatawan asing. Hingga masyarakat setempat sudah bosan karena laporan mereka tidak ditindaklanjuti. Keterbatasan sarana prasarana juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas, seperti jumlah mobil patroli hanya tersedia satu unit, sehingga cakupan wilayah pengawasan menjadi kurang maksimal mengingat luasnya daerah yang harus dipantau. Tidak hanya itu, wilayatul hisbah juga tidak memiliki kamera dokumentasi yang seharusnya dapat digunakan sebagai alat bukti maupun pendukung laporan ketika terjadi pelanggaran. Keterbatasan fasilitas ini berdampak langsung pada efektivitas penindakan terhadap wisatawan asing yang melakukan perbuatan *ikhtilath*, karena tanpa dukungan sarana yang memadai, pengawasan seringkali tidak berjalan optimal.

Saran, wilayatul hisbah perlu menyusun SOP khusus wisatawan asing. Meningkatkan sosialisasi hukum syari'at dalam bahasa asing di tempat wisata agar berjalan efektif dan tidak deskriminatif, serta memperkuat pelatihan petugas dalam komunikasi lintas budaya. Selain itu Pemerintah Kota Sabang bersama wilayatul hisbah segera menyusun kebijakan teknis yang aplikatif untuk menangani pelanggaran syari'at oleh wisatawan asing tanpa mengorbankan nilai-nilai pariwisata.

Kata Kunci : *Ikhtilath*, Wilayatul hisbah, Qanun, Syari'at Islam, Wisatawan Asing, Kota Sabang.

SUMMARY

LOLITA PRASETYANI
NIM 210510135

***THE ROLE OF THE HISBAH AUTHORITY IN
MONITORING THE CRIME OF IKHTILATH
BY FOREIGN TOURISTS***
**(Johari, S.H.,M.H. and Fitri Maghfirah,
S.H.,M.H.)**

The Aceh government has issued Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayah Law, specifically in Article 5 point (c) regarding the prohibition of committing the crime of ikhtilath, which applies to all individuals in Aceh. However, acts of ikhtilath have been committed by foreign tourists in the city of Sabang and have not received serious attention from the authorities. The purpose of this research is to understand the efforts of wilayatul hisbah in enforcing laws against ikhtilath in the city of Sabang, identify obstacles in the enforcement of the Qanun, and provide appropriate solutions.

The research method used in this study is empirical legal research using a case approach. Data was collected through several techniques, namely observation, documentation, and interviews with officers of wilayatul hisbah, village heads, religious figures, the community, and foreign tourists, and then analyzed qualitatively.

The results of this study show that the wilayatul hisbah does not have a specific SOP, has limited personnel, lacks foreign language training, and is passive in responding to violations of ikhtilath by foreign tourists. The local community has grown tired because their reports are not followed up. The limited infrastructure is also a factor that hinders the implementation of tasks, such as the patrol car availability which consists of only one unit, thus making the coverage of the surveillance area less than optimal given the vast area that needs to be monitored. Moreover, the wilayatul hisbah also lacks documentation cameras that should be used as evidence or support for reports when violations occur. This lack of facilities directly impacts the effectiveness of law enforcement against foreign tourists committing ikhtilath, as without adequate supporting facilities, supervision often does not run optimally.

Suggestions for Wilayatul Hisbah to develop specific SOPs for foreign tourists. Enhance the dissemination of Sharia law in foreign languages at tourist sites to ensure effective and non-discriminatory communication, as well as strengthen training for officers in cross-cultural communication. Additionally, the Sabang City Government, along with Wilayatul Hisbah, should promptly formulate practical technical policies to address Sharia violations by foreign tourists without compromising tourism values.

Keywords: *Ikhtilath, Wilayatul Hisbah, Qanun, Islamic Law, Foreign Tourists, Sabang city.*